

Analisis Gender dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Lokal

Nurlianti Muzni¹, Venti Puspita²

¹²Universitas Bengkulu
nurlimuzni@unib.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis Peran gender dalam mendorong Desa Wisata di Desa Panca Mukti. Kemampuan perempuan dalam mengisi posisi di bidang pariwisata dapat mendorong peluang ekonomi yang positif. Kelompok Batik basurek Desa Panca Mukti, bisa menjadi alternative promosi desa berbasis wisata lokal dengan menekankan peran gender yang ada di sana. Keterlibatan perempuan dalam bentuk afirmatif saja dirasa kurang cukup. Ada upaya produktif lain yang dibutuhkan seperti bagaimana mengorganisir perempuan Desa Panca Mukti untuk menentukan pola keterlibatan yang tepat. Hingga kerja-kerja yang saling berintegrasi dengan pengembangan desa Panca Mukti secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data secara langsung melalui wawancara dan FGD. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Perempuan perempuan harus diberikan ruang yang berkeadilan, serta pengelolaan bumdes yang juga berkelanjutan. Partisipasi perempuan dalam mendorong desa wisata dapat terlihat dari produk-produk yang dihasilkan secara produktif. Berdasarkan analisis dari konteks Akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, kehadiran perempuan baru Sebatas mengetahui, namun belum ke tahap apresiasi dengan memberikan akses dan ruang yang sama (tidak hanya semu), partisipasi dan kontrol yang nyata, serta manfaat yang dapat ditangkap desa sebagai peluang. Selain itu terdapat kendala, kesenjanga, serta permasalahan yang menjadi batu sanding sulitnya perempuan mengambil peran dan keputusan dalam mendorong desa wisata.

Kata kunci: Analisis Gender, Desa Wisata

Abstract

The purpose of this study is to analyze the role of gender in encouraging Tourism Villages in Panca Mukti Village. The ability of women to fill positions in the tourism sector can encourage positive economic opportunities. The Batik Basik Group of Panca Mukti Village can be an alternative to promoting lokal tourism-based villages by emphasizing the role of gender there. Women's involvement in the affirmative form alone is not enough. There are other productive efforts needed such as how to organize the women of Panca Mukti Village to determine the right pattern of involvement. Until the work that is integrated with the development of Panca Mukti village as a whole. This study uses a qualitative research method with a direct data collection method through interviews and FGD. Based on the results of the research, it was found that women must be given a fair space, as well as sustainable management of bumdes. Women's participation in encouraging tourism villages can be seen from the products produced productively. Based on an analysis from the context of Access, participation, kontrol and benefits, the presence of women is only limited to knowing, but has not yet reached the appreciation stage. Namely by providing the same access and space (not only pseudo), real participation and kontrol, as well as benefits that can be captured by the village as an opportunity. In addition, there are obstacles, gaps, and problems that are the cornerstone of the difficulty of women taking roles and decisions in encouraging tourism villages.

Keywords: Gender analysis, Tourism Village

Pendahuluan

Wilayah desa merupakan sumber potensi lokal yang memiliki peluang pengembangan berkelanjutan secara alami. Dilihat dari letak geografis Indonesia, pembagian letak wilayah desa yang terbagi dalam wilayah pesisir maupun hutan tropis, merupakan bekal alamiah yang dapat menunjang pembangunan hingga memiliki suatu pencirian yang menarik. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian dalam Negeri di Indonesia terdapat 83.381 desa/kelurahan yang tersebar di 34 Provinsi. Jumlah yang cukup dapat dipertimbangan jika dikaitkan dengan kondisi objektif produktifitas masyarakat dalam mengembangkan potensi baik alam maupun buatan yang berkaitan dengan pembangunan.

Sektor Pariwisata menjadi suatu hal yang dilirik pemerintah pusat, yang secara instruksional memberikan kesempatan kepada seluruh desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi yang dimiliki hingga mencapai kesepakatan peningkatan pariwisata. Hal tersebut dapat menjadi landasan kemandirian desa, dalam kerangka pembangunan desa berkelanjutan yang menjadi efektif ketika digerakkan dan dilaksanakan langsung kepada masyarakat yang memahami lokasi mereka. Pembangunan yang efektif, biasanya akan

menguatkan akar pembangunan dengan menemukan sumber prioritas yang tepat dalam kerangka keberlanjutan.

Hal menarik menjadi perhatian ketika berbicara mengenai pembangunan pariwisata adalah bagaimana manusia-manusia yang ada di desa tersebut dapat terlibat seluruhnya. Artinya, ada pembagian peran dimasyarakat, termasuk pada peran gender yang seimbang dalam ranah lokal. Sehingga yang menjadi sorotan adalah bagaimana pariwisata menjadi sector yang positif bagi perempuan. Duffy et al (2015) menyebutkan bahwa sector pariwisata menjadi sumber peluang untuk mendapatkan kemerdekaan ekonomi dan sosial, terutama bagi perempuan.

Di Indonesia, peluang kesempatan perempuan dalam mengembangkan kemampuan masih menjadi kajian yang menarik dari berbagai sudut pandang. Bahwa posisi yang tidak seimbang, antara perempuan dan laki-laki, missal dalam menentukan kebijakan, ide pembangunan, maupun posisi strategis lain memang masih terjadi. Bisa jadi karena factor internal masyarakat yang masih menganut patriarki yang telah mengakar baik kepada perempuan maupun laki-lakinya, maupun karena factor eksternal misalnya kebijakan secara nasional yang belum mengatur secara tegas tentang keterlibatan seluruh

masyarakat termasuk unsur gender dalam pariwisata.

Kemampuan perempuan dalam mengisi posisi di bidang pariwisata dapat mendorong peluang ekonomi yang positif. Misalnya bagaimana perempuan memiliki keterampilan dalam pengemasan, hingga menciptakan suatu produk yang memiliki nilai jual. Namun potensi perempuan yang masih terbangun dari sistem patriarki, sulit untuk melihat hal tersebut secara profesional. Sehingga posisi perempuan masih terus dianggap sebagai pelengkap, bahkan terpisah jauh dari ruang yang diberikan kepada laki-laki.

Desa panca Mukti, merupakan desa dengan potensi sumber daya manusia yang cukup baik. Kemampuan dan semangat perempuan untuk berkembang secara ekonomi dan maju dalam bentuk ide-ide juga sangat besar. Kelompok batik besurek yang sudah berdiri misalnya. Menjadi salah satu contoh ketekunan dan keinginan untuk maju bersama dalam satu organisasi. Kelompok perempuan Batik Basurek Panca Mukti sudah berjalan cukup lama. Permasalahan bukan hanya pada minimnya kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan usaha yang dikerjakan secara berkelompok, namun juga dorongan yang dapat menjadi support system dalam meningkatkan produktifitas kerja.

Kelompok Batik basurek Desa Panca Mukti, bisa menjadi alternative promosi desa berbasis wisata lokal dengan menekankan peran gender yang ada di sana. Promosi gender dapat menjadi salah satu strategi promosi pariwisata melalui startegi lokal marketing dan promosi yang komunikatif (Zheng, 2020). Butuh keselarasan antara pengembangan potensi berkelanjutan, dengan posisi perempuan yang ada di sana. Menjadikannya sebagai suatu upaya strategis untuk mencapai kemajuan dan kemandirian masyarakat. Keterlibatan perempuan dalam bentuk afirmatif saja dirasa kurang cukup. Ada upaya produktif lain yang dibutuhkan seperti bagaimana mengorganisir perempuan Desa Panca Mukti untuk menentukan pola keterlibatan yang tepat. Hingga kerja-kerja yang saling berintegrasi dengan pengembangan desa Panca Mukti secara keseluruhan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, masyarakat Panca Mukti memiliki peran yang besar dalam mendorong kemajuan ekonomi dan wisata desa. Hanya sikap pragmatis dan kemajuan teknologi yang belum dapat dijangkau masyarakat yang menjadikan keberlanjutan menjadi lambat (Muzni, 2023). Sehingga alternative yang disarankan adalah meyakinkan masyarakat bahwa kemandirian desa dapat berkorelasi bagi kebaikan kehidupan di desa.

Kelompok Batik besurek Panca Mukti juga berusaha membuktikan bahwa mereka tetap mampu berdiri ditengah gempuran produk-produk luar yang berani memberikan harga yang lebih murah.

Dengan menggunakan perspektif gender, penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana kelompok batik besurek bisa tetap bertahan, serta melihat secara kritis bagaimana desa dapat menopang kebutuhan-kebutuhan mereka tanpa melihat latar belakang gendernya. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana kesadaran perspektif gender terbangun dalam pengelolaan desa wisata di Desa Panca Mukti. Satu konsep yang telah diterima bahwa, kesetaraan gender telah terbukti secara empiris berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan (Kabeer & Natali, 2013). Kesetaraan gender tidak memandang alokasi kekhususan jenis pekerjaan tertentu yang dikerjakan laki-laki dan kekhususan jenis pekerjaan tertentu yang dikerjakan (Kartiwi, dkk, 2022).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif paradigma non-positivistik, yang menjadi panduan peneliti dalam melaksanakan model atau proses penelitian yang sesuai. Pemilihan informan dengan Teknik sampling yang disebut purposive sampling. Pemilihan Teknik ini

berdasarkan pada pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut berdasarkan kebutuhan penelitian dan harapan yang mungkin didapatkan selama proses penelitian berlangsung. Berdasarkan konteks penelitian yang dilakukan, peneliti memilih metode *focus group discussion* dan wawancara sebagai alat mengumpulkan data. Peneliti menggunakan Teknik analisis data model Miles and Huberman, yang mengutamakan 3 proses. Yaitu peneliti melakukan pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data dan terakhir penarikan kesimpulan.

Analisis Gender dalam Komunikasi Pembangunan

Komunikasi bersifat kompleks, mungkin kalimat itu akan lebih tepat mengawali suatu diskursus yang juga tidak pernah berhenti dibicarakan. Persoalan gender dan komunikasi, atau dari konteks pesan, komunikator, komunikan, medium dan sebagainya akan menentukan makna pembicaraan. Tidak lepas juga, bagaimana kemudian status gender juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap makna-makna pesan yang disampaikan.

Dalam pembangunan, peran komunikasi menjadi sentral. Rangkaian-rangkaian yang awalnya terpisah, harus dirajut melalui proses-proses

penyampaikan pesan yang berkelanjutan. Artinya harus sesuai dengan tujuan pesan itu disampaikan hingga terjadi kesamaan makna. Bentuk-bentuk komunikasi pembangunan yang partisipatif berwawasan gender dalam konsep pemberdayaan menurut Serveas (2002) mencakup forum dialog akar rumput (*grassroots dialog forum*), fungsi baru komunikasi pada media partisipatif (*participatory media*), berbagi pengetahuan secara setara (*knowledge-sharing on a co-equal basis*), dan model komunikator pendukung pembangunan (*Development Support Communication*). Lebih jauh lagi masyarakat diajak untuk merumuskan permasalahan dan menemukan pemecahannya sekaligus pelaksanaan kegiatan untuk pemecahan permasalahan. Disinilah peran-peran gender akan dipertaruhkan.

Berbagi pengetahuan secara setara sering diidentik dengan kesamaan seluruh fungsi dan peran gender di masyarakat. Hal seperti ini yang terkadang menjadi batu sandungan untuk masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang konsep kesetaraan. Sehingga ruang yang senantiasa menginginkan peningkatan keterwakilan, dari proses suara dan angka menjadi semakin sulit. Sederhananya, konsep perjuangan dibenturkan dengan

pembenaran subjektif yang dimunculkan dari pemikiran yang patriarkal.

Pembangunan sering kali mengabaikan pengakuan keterlibatan besar perempuan di dalamnya. Bahkan pengabaian bahwa perempuan juga memiliki peran yang cukup signifikan. Terbukti bahwa gaung perjuangan perempuan untuk mengambil posisi dalam proses pembangunan juga membutuhkan energi lebih dibanding dengan laki-laki. Karena selain berbicara tentang peran dan posisi, perempuan juga harus memperjuangkan adanya keterlibatan mereka untuk mengisi ruang-ruang yang menjadi kebutuhan suara perempuan untuk wilayah pembangunan tersebut.

Kebijakan yang tidak berpijak pada perspektif, akan memunculkan suatu bentuk hasil produksi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan perempuan sebagai pengguna hasil pembangunan. Misalnya ada banyak fasilitas-fasilitas umum yang tidak memperhatikan kebutuhan keamanan perempuan, ibu hamil, menyusui, dan dalam kondisi lainnya. Sehingga patut dipertanyakan arah pembangunan yang dibicarakan mengarah kepada siapa dan dengan tujuan apa.

Komunikasi yang terbentuk dalam ruang sosial masyarakat, tetap menjadi suatu kajian yang belum berakhir. Walau

sejauh apa perjuangan kelompok yang menginginkan keadilan gender menjadi dasar masyarakat melakukan proses pembangunan, namun tetap sulit jika perspektif belum terbentuk. Komunikasilah yang memiliki peran yang cukup tepat untuk meletakkan dasar itu. Melalui proses komunikasi yang berjalan secara dinamis namun konstruktif, keadilan gender akan terbentuk dalam proses pembangunan, walau diakui itupun juga akan membutuhkan waktu yang lama.

Positioning perempuan dalam pembangunan

Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan masih tersebar di sebagian besar wilayah di Indonesia. setidaknya Penelitian serupa yang ingin menunjukkan bagaimana suatu wilayah melibatkan perempuan dalam proses pembangunan masih terbilang minim. Amory (2019), bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Sulawesi Barat tidak seiring sejalan. Hal tersebut sejalan dengan angka kemiskinan perempuan, jenjang Pendidikan, serta akses ketenagakerjaan yang tidak seimbang. Penelitian lain oleh Pratama dan Fitriyah (2021), yang mengungkapkan bahwa perbandingan representasi perempuan pada kelembagaan desa dalam kebijakan

pembangunan perempuan dan anak di Desa Rancamaya dan Desa Jompo Kulon, memperlihatkan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam kelembagaan. Perwakilan yang cukup signifikan yaitu satu orang perempuan, berdampak pada proses-proses penyusunan kebijakan terkait pembangunan yang cenderung hanya memperhatikan dalam segi fisik. Serta beberapa penelitian lainnya yang menunjukkan hasil yang serupa.

Kebijakan Pengarusutamaan gender menjadi sebuah pedoman dalam mewujudkan kesetaraan gender pada pembangunan daerah khususnya pembangunan sosial (Putra, 2023). Dalam teori *positioning* (Raggatt 2007), pemberdayaan lebih diarahkan pada "conversational" yaitu proses dialog dan dialektika.

Dilanjutkan, bahwa perspektif teori *positioning* dalam komunikasi gender menggambarkan hubungan antara subjeknya, diskursus, praktek dan posisi. Bagaimana secara seimbang menekankan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan yang berlangsung. Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan nasional akan memberikan konsekuensi yang positif dalam terjadinya perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup bangsa (Putri, 2021). Walaupun nyatanya hal tersebut masih jauh dari

keinginan secara konseptual, namun setidaknya bangunan yang ingin menuju kearah ideal tersebut terus berusaha dibangun.

Secara teknikal di kelompok masyarakat, upaya memposisikan diri mereka baik secara pribadi maupun melalui orang lain terjadi melalui proses sosial yang berjalan secara interaktif. Posisi yang dibentuk berdasarkan respon dari interaksi tersebut, berubah menjadi proses sosial dan budaya yang terkadang berbentuk simbolis. Missal, perwakilan perempuan dalam kelompok kelembagaan desa, secara simbolis ada, namun secara strategis nyatanya belum memberikan pengaruh signifikan karena kurang energi serta dorongan dari orang sekitar yang mayoritas adalah laki-laki.

Pembagian peran gender bagi laki-laki dan perempuan di Indonesia sebagian besar masih mengikuti ideologi gender klasik, laki-laki di sektor publik dan perempuan di sector domestic (Sitanggang, 2018). Hal ini juga terasa ditingkat akar rumput yang keseharian didominasi oleh interaksi sosial yang berlangsung lama. Terdapat proses legalitas masyarakat, yang kemudian berakhir pada pengakuan akan posisi perempuan dan laki-laki di suatu wilayah. Ini yang disebut sebagai pembagian peran yang kemudian memunculkan dampak dari pelaksanaan

setelahnya. Tak sulit kita menemukan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada kebutuhan perempuan, serta sebaliknya. Ada banyak kebijakan yang kemudian muncul karena perspektif yang berpihak pada salah satu kepentingan kelompok. Hal ini juga dapat ditemukan pada proses pembangunan desa berbasis lokal.

Menempatkan posisi perempuan di lingkungan sosial dalam peran-peran strategis, bukanlah suatu hal mudah. Seperti itu juga ketika membicarakan peran-peran perempuan dalam mendorong desa wisata hingga mengelola peluang-peluang menjadi produktif. Tentu usaha yang harus dikeluarkan oleh perempuan tidak semudah dengan usaha yang dilakukan laki-laki ketika ingin memposisikan diri secara sejajar baik dalam lingkup sosial maupun struktural. Hal ini tidak lain karena adanya kontruksi yang telah terbentuk lama hingga menjadi suatu nilai yang dipegang oleh masyarakat.

Puspasari & Sarifuddin (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa peran gender berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang terdapat pola peningkatan kesejahteraan secara informal melalui perubahan mata pencaharian yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan warga. Peran yang setara tentu akan memberikan dampak

berkelanjutan bagi program-program yang menginisiasi desa wisata. Banyaknya peluang yang bisa diciptakan secara Bersama, dapat berkembang dengan baik jika semua diberikan kesempatan yang sama pula.

Kegiatan wisata yang diinisiasi perempuan juga menyebar di beberapa wilayah Indonesia. Peran perempuan dalam mempertahankan kampung wisata di 6 kampung (kampung kue, krupuk gunung anyar, rempe tenggilis, hijau jjambangan, sepatu osowilangon, dan herbal genteng) terlaksana dengan baik, yaitu 88% sebagai pelaksana, 28 % sebagai pemantau (Rukmana & Sucipto, 2023).

Penerapan *Gender Analysis Pathway* dalam Mendorong Desa Wisata

Isu gender menghasilkan sebuah isu yang mendorong salah satu kesadaran yang khas, bukan hanya semata-mata pandangan filosofis atau wacana, akan tetapi punya implikasi praktis yang memang dibutuhkan (Nurhafiyanti, dkk, 2022). Gender bukan semata-mata membicarakan salah satu jenis kelamin tertentu, namun menyangkut seluruh manusia terutama dalam konteks kehidupan sosial. Masih banyak asumsi yang mencoba mendudukkan bahwa isu gender hanya milik perempuan, atau sebagian kecil perempuan saja. Sehingga asumsi tersebut tidak jarang membawa wacana di masyarakat yang membatasi

untuk membicarakan tentang gender karena merasa “jauh” dengan isu ini.

Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan analisis gender terutama dalam bidang kajian akademik. Salah satunya adalah *Gender Analysis Pathway* (GAP) merupakan suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan (Chusna, dkk, 2022).

Dilanjutkan Menurut Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) (dalam Nurhaeni, 2015) jika diterapkan dalam suatu kebijakan: (1) mengidentifikasi kesenjangan gender dilihat dari akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diperoleh warga laki-laki maupun perempuan; (2) mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender; (3) merumuskan permasalahan sebagai akibat adanya kesenjangan gender; dan (4) mengidentifikasi langkah-langkah atau tindakan intervensi yang diperlukan.

Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan (Chusna, dkk. 2022). Melalui analisis ini, dapat dilihat perencanaan serta kesiapan kebijakan di desa terkait desa wisata yang melibatkan perempuan serta menjadi acuan

bagi para perencana kebijakan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender (Bappenas, 2011). Pengembangan Pembangunan desa wisata di Desa Panca Mukti awalnya bertujuan untuk ketahanan pangan saja, kemudian berkembang dalam pengembangan potensi lain termasuk fungsi area bendungan (Askani, dll, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikumpul beberapa temuan terkait analisis penerapan gender dalam pembentukan dan pengelolaan desa wisata di Panca Mukti serta beberapa hal lain yang menjadi kendala dalam proses pembentukannya.

a. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan tujuan kebijakan, identifikasi program dan masalah-masalah yang akan dianalisis. Bahwa kebijakan yang berkeadilan tetap menjadi wacana yang menarik untuk dilihat. Kebijakan yang sensitive gender akan membawa keadilan bagi seluruh masyarakat yang mendiami, karena selama ini masih maskulinitaslah yang menguat pada akar rumput masyarakat. Pada konteks penelitian ini, implementasi metode GAP berupa kebijakan yang dapat mendorong UMKM yang diinisiasi perempuan desa panca mukti terutama untuk mendorong dan mendukung desa wisata. Tujuan dari adanya UMKM yang mendukung

aktifitas perempuan, dapat mendorong pemberdayaan yang berkeadilan terutama dalam bidang ekonomi. Kebijakan dapat dimulai dari pengelolaan dan system pengelolaan BUMDES, serta keterlibatan perempuan dalam pengelolaan.

b. Kedua, yaitu mengidentifikasi potensi-potensi yang muncul dari ide-ide perempuan, bagi perempuan sebagai inisiator, penggerak, atau pendukung utama bagi berjalannya UMKM dan program agar terbentuknya desa wisata yang berkelanjutan dan memiliki ciri khas. Data-data diperoleh berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada para informan untuk memunculkan perspektif gender yaitu berupa Wisata Cek dam, yang merupakan agrowisata buatan. Dijadikan sebagai kolam pemancingan serta ditambah dengan tanaman hias dan tanaman buah-buah atau sayuran untuk menjadi alternative pengunjung. Wisata ini sempat ramai dan menjadi salah satu andalan di desa Panca Mukti. Namun terhenti karena status kepemilikan lahan serta pengelolaan dari bumdes yang juga terhenti. Selain itu, ada juga usaha rumahan yang dikelola oleh masing-masing personal. Usaha rumahan tersebut mulai dari Batik (kampung batik), Tape, Rengginang dan olahan

umbi-umbian, bakso, serta yang lainnya.

c. Ketiga yaitu mengidentifikasi kesenjangan gender yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan mempunyai ruang yang sama dalam hal berkegiatan, mengambil kebijakan dan lain-lain. Namun ruang gender terkesan semu, karena pada akhirnya kebijakan akan diambil pada keputusan akhir, hampir tidak mengakomodir kebutuhan perempuan terutama dalam pengembangan usaha mereka. Identifikasi gender dalam analisis ini dapat dilihat dalam 4 faktor.

1. Akses

Jika dilihat dari akses yang diberikan kepada perempuan, secara umum telah tersedia. Akses yang diberikan berupa jika ada kegiatan, maka perempuan diajak untuk bergabung. Walaupun terkadang tidak dijadikan sebagai kelompok utama, namun keterwakilan perempuan selalu diminta. Dukungan tersebut tidak berlanjut kedalam bentuk anggaran. Untuk tahun 2024 misalnya, tidak ada anggaran khusus untuk mendorong terbentuknya UMKM desa, atau mendorong usaha produktif

perempuan agar bisa lebih jauh berkembang.

2. Partisipasi

Secara angka, partisipasi perempuan Desa Panca Mukti dalam mendorong desa wisata sudah terlihat dari aktifitas yang mereka laksanakan. Hal tersebut menunjukkan produktifitas dan partisipasi perempuan yang aktif dalam berbagai kegiatan. Misalnya dalam mengupayakan kampung batik, atau ikut hadir dalam berbagai rapat. Perempuan diberi ruang untuk bersuara atau menyampaikan pendapat dalam berbagai rapat. Namun, kemudian apakah suara tersebut ditindaklanjuti, itu masih menjadi catatan Bersama.

3. Kontrol

Dalam memberikan kontrol, perempuan desa Panca Mukti memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan yang lain. Namun karena literasi anggaran dan kebijakan bukan hal yang biasa untuk dibicarakan, sehingga tidak menjadi urgensi untuk dikontrol terus menerus. Dalam artian, kebijakan di desa jarang menjadi pembicaraan atau tidak pernah

dianggap sebagai masalah atau untuk dikontrol secara langsung. Tipikal saling percaya dan rasa hormat dengan kades atau perangkat desa lain juga dijadikan factor kenapa tidak ada pertanyaan terkait program untuk mendorong dan mengelola desa wisata.

4. Manfaat

Kehadiran kampung batik dan usaha-usaha rumahan dari masyarakat Desa Panca Mukti telah memberikan warna lain bagi desa Panca Mukti. Kampung batik menjadi ciri khas di desa ini, bahkan kampung batik ini merupakan satu-satunya yang ada di Bengkulu tengah.

d. Langkah selanjutnya, atau langkah ke empat yaitu mengidentifikasi masalah gender yang terjadi. Pada tahap ini peneliti melihat bagaimana program yang dijalankan oleh pemerintah dapat mendukung usaha-usaha yang dilakukan oleh kelompok perempuan dalam hal ini peneliti melihat 3 bagian yang juga menjadi temuan dalam penelitian :

- Kendala
Kendala keberlangsungan keterlibatan perempuan dalam

pengelolaan wisata biasanya karena adanya peran-peran domestik yang melekat. Dalam penelitian ini diperoleh kasus sulitnya kelompok kampung batik untuk merintis hingga mempertahankan aktifitas-aktifitas yang dapat dilakukan secara produktif. Seperti yang disampaikan oleh salah satu inisiator kampung batik, anggota-anggota mereka berkurang dan sulit bertahan karena berbagai alasan. Misalnya ikut suami, kegiatan yang dianggap tidak menghasilkan pendapatan atau uang, atau ada urusan rumah (domestik) yang sulit mereka tinggalkan.

- Apakah terjadi kesenjangan
Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa kesenjangan yang terjadi antara peran perempuan dan laki-laki terutama di desa tidak akan terasa. Proses sosial yang telah tumbuh kuat dan mengakar, mengaburkan hal yang ideal terkait pada relasi positif yang mestinya berjalan di desa. Keadilan serta peran yang terbagi secara rata, nyatanya masih sulit ditemukan. Klan

maskulinitas ada, namun tidak dirasakan oleh masyarakat.

- Permasalahan

Masalah yang kemudian muncul adalah, potensi-potensi yang mestinya dapat berkembang secara positif tidak ditangkap dengan baik. Bahwa kehadiran hasil produktifitas terutama yang dilakukan oleh perempuan desa, hanya dianggap 'tambahan' bukan sebagai objek utama. Yang terjadi akhirnya adalah hasil produksi yang tidak termanajemen dengan baik, yang dibuktikan dengan aktifitas yang dilakukan oleh BUMDES terhenti karena tidak melihat peluang-peluang dengan baik.

- e. Selanjutnya yaitu merumuskan kebijakan. Perumusan kebijakan ini merupakan langkah lanjut dari hasil analisis permasalahan yang terjadi. Bahwa misalnya terjadi kesenjangan dalam konteks sosial masyarakat dan structural desa. Walaupun peluang perempuan diberikan untuk berpartisipasi, namun kenyataannya power yang dimiliki oleh perempuan untuk menarik keputusan tidak sebesar

laki-laki. Artinya, suara-suara yang disampaikan saat rapat atau pertemuan, belum menjadi suatu urgensi untuk diprioritaskan untuk segera dilaksanakan.

- f. Langkah terakhir adalah menyusun rencana aksi kebijakan. Langkah yang lebih tepat untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam bidang pembangunan terutama pengelolaan wisata desa adalah dengan melibatkan perempuan secara utuh. Kehadiran perempuan tidak hanya sekedar mengisi kuota atau 'asal ada' dan 'asal undang'. Namun memberikan kesempatan perempuan untuk berani berbicara, untuk berani mengeksekusi pilihan, serta difasilitasi dalam bentuk kesempatan pengembangan lainnya. Kebijakan yang disusun harus dapat membuka mata, bahwa usaha-usaha yang dihasilkan oleh perempuan, dan masih dianggap sebagai usaha rumahan, harus dibuatkan payung khusus untuk mensinergikan kemampuan mereka dalam memproduksi dan memasarkannya. Selain itu, melibatkan perempuan dalam peran-peran strategis juga penting,

Kesimpulan

Perempuan desa Panca Mukti, memiliki andil yang cukup besar untuk meningkatkan nilai produktifitas dari produk-produk yang dihasilkan di desa. Namun dengan catatan, bahwa perempuan harusnya diberikan ruang yang berkeadilan, serta pengelolaan bumdes yang juga berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Partisipasi perempuan dalam mendorong desa wisata dapat terlihat dari produk-produk yang dihasilkan secara produktif.
2. Berdasarkan analisis dari konteks Akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, kehadiran perempuan baru Sebatas mengetahui, namun belum ke tahap apresiasi. Yaitu dengan memberikan akses dan ruang yang sama (tidak hanya semu), partisipasi dan kontrol yang nyata, serta manfaat yang dapat ditangkap desa sebagai peluang
3. Terdapat kendala, kesenjangan, serta permasalahan yang menjadi batu sanding sulitnya perempuan mengambil peran dan keputusan dalam mendorong desa wisata.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, atas bantuan panelitian dengan

skema PNBPFakultas. Terima kasih kepada seluruh informan, perangkat desa Panca Mukti, dan Kampung Batik Panca Mukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Amory, J D S. (2019). Peranan Gender Perempuan dalam Pembangunan di Sulawesi Barat Tahun 2016-2018. Volume 1, No. 1, 1-15, 2019
- Askani., Putri, S., Salehan., Desita R. (2023). Perumusan Strategi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Panca Mukti Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah). Jurnal STIA Bengkulu: Committee to Administration for Education Qualit, Vol 2. No 1 Januari 2023 page:17-24.
- Aziza, N., Nila A., Vera NS., Andi A. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Panca Mukti untuk Mewujudkan Desa Kreatif. Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS. Volume 2, No 2 April 2024.
- Chusna, I N., Alinda M K., Megawati SP., Eka ZL. (2022). Strategi Kebijakan Gender Analysis Pathway (Gap) untuk Menyelesaikan Masalah Sosial Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul. OISAA Journal of Indonesia Emas. . 2022, 141-147
- Duffy, L. N., Kline, C. S., Mowatt, R. A., & Chancellor, H. C. (2015). Women in tourism: Shifting gender ideology in the DR. *Annals of Tourism Research*, 52, 72–86. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2015.02.017>
- Hasnawati, S., Yuningsih., F H. (2020). Muslimin Pengembangan Desa Wisata Berbasis Gender di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

- Seminar Teknologi, Akuntansi, Bisnis, Ekonomi dan Komunitas 5 (STABEK 5). Laporan Pengabdian
- Hubeis, A. V. S., Mulyandari, R. S. H. (2010). Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan Berwawasan Gender. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. Februari 2010, Vol. 08, No. 1
- Kabeer, N., & Natali, L. (2013). *Gender Equality and Economic Growth: Is there a Win-Win?* Institute of Development Studies. East Sussex: IDS Working Paper
- Kartiwi, P A., Arwanto., Baidhowah, A.R. (2022). Inovasi dan Pembangunan Desa di Kabupaten Gunungkidul: Inklusivitas Kesejahteraan dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan pemerintah*. Volume 7, Nomor 1, Juni 2022, 59-81. Doi: <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i1.2219>
- Muzni, N. (2023). Realitas Komunikasi Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Panca Mukti dalam Mewujudkan Desa Wisata . penelitian Pendanaan PNBP Fisip. Proses submit jurnal.
- Nanta, L R Y., Diyah U. (2023). Relasi Gender dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Mutiara di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Paradigma*, Volume 12, No 03, 2023.
- Nurhaeni, I D A. (2015). Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD). pp. 23-47
- Nurhafiyanti, L., Yusup N., Eldi M. (2022). Analisis Peran Gender Terhadap Kompetensi dan Kinerja Anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Sosioedukasi. Volume 11 No. 2. November 2022.
- Pratama, DBP., Fitriyah. (2021). Efektivitas Representasi Perempuan Pada Kelembagaan Desa dalam Kebijakan Pembangunan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Desa Rancamaya, Cilongok dan Desa Jumbo Kulon, Sokaraja Kabupaten Banyumas). *Journal of Politic and Government Studies*. Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021
- Pratiwi, D A. (2022). Keterlibatan Perempuan Secara Formal dalam Pengelolaan Pariwisata di Desa Wisata Kebonagung, Bantul. *Gajah Mada Journal of Tourism Studies*. Vol 4 No 22 (2022). P 95-113. doi.org/10.22146/gamajts.v4i2.82951
- Puspasari, D A., Sariffuddin. (2015). Peran Gender dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wisata Colo Kabupaten Kudus. *Jurnal Tata Loka*. Volume 17. Nomor 4 November 2015, 223-230.
- Putra, I P A P.(2023). Perempuan dalam pariwisata: Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender pada Pengelolaan Objek Wisata Tukad Bindu di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* Volume9. Number 1, Juni 2023, pp.81-91. DOI: <https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.58445>
- Putri, D. (2021). Strategi Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Sosial (Studi Kasus Perempuan di Desa Mandi Angin, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara). *ICODEV: Indonesian Community Development Journal* Vol. 2, No. 1, Juni 2021, 23-34 ISSN: 2775-1538 (online)
- Servaes, J. (2002). *Communication for Development: one world, multiple*

- cultures. Second Printing. Hampton Press, Inc. Cresskill, New Jersey.
- Raggatt, Peter T.F. (2007). Forms of Positioning in the Dialogical Self: A System of Classification and the Strange Case of Dame Edna Everage. *Theory Psychology* tahun 2007 (17): 355. [terhubung berkala] 31 Oktober 2008.
<http://tap.sagepub.com/cgi/content/abstract/17/3/355>.
- Rukmana, S N., Sucipto. (2023). Peran Perempuan dalam Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Komunitas di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengembangan Kota*. Volume 11. No 2 (112-123). DOI: 10.14710/jpk.11.2.112-123
- Zheng, D. (2020). Building resident commitment through tourism consumption: A relational cohesion lens. *Journal of Destination Marketing and Management*, 16(May).
<https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100441>
- [Inpres]. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. 2000.
- [Kemenparekraf]. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulanan Tahun 2020. 2020.
- [Permen]. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. 2011.
- [Permen]. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata melalui Desa Wisata. 2010.
- [Permen]. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. 2011.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/22/berapa-jumlah-desakelurahan-di-indonesia>